

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

The Global Risk Report menempatkan isu lingkungan sebagai ancaman teratas terhadap keamanan manusia.¹ Fenomena perubahan lingkungan (iklim) yang terjadi dalam skala global disebabkan oleh adanya degradasi lingkungan (*anthropogenic climate change*).² Masyarakat internasional menyadari bahwa perubahan iklim memiliki potensi resiko dan dampak nyata sehingga perlu upaya adaptasi dan mitigasi terhadap permasalahan ini. Melalui *Kyoto Protocol*, negara-negara sepakat melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masing-masing negara.³ Dalam mengatasi fenomena perubahan iklim ini, *The UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merumuskan kerangka kerja yang dikenal dengan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Resiko dan dampak degradasi lingkungan diatasi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan, dan melestarikan dan meningkatkan cadangan karbon hutan dengan meningkatkan pengelolaan hutan.⁴

Sebagai negara terdepan dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik pada level nasional maupun internasional, Norwegia telah meratifikasi dan mengimplementasikan *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*

¹ World Economic Forum. Marsh & McLennan Companies. Dan Zurich Insurance, "Global Risks Report 2019", (2019), hal. 15

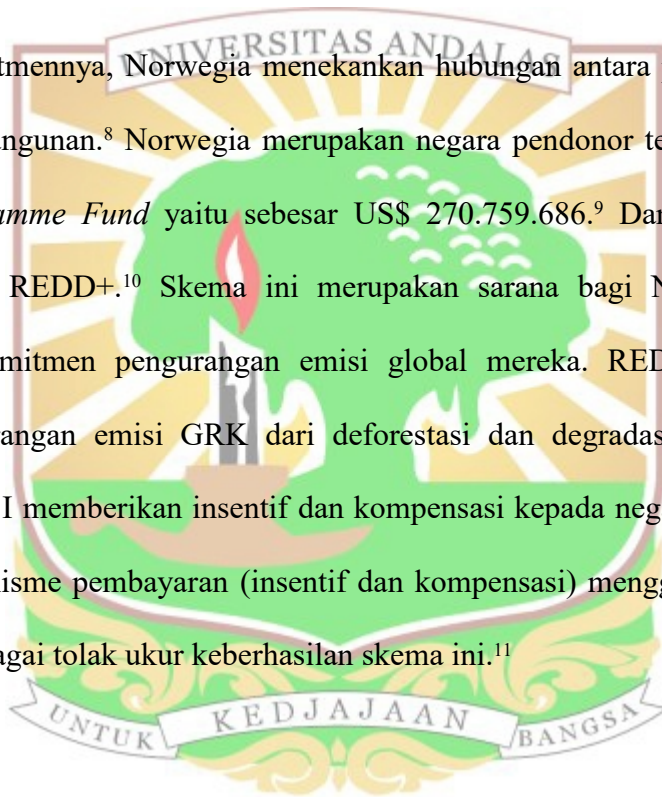
² Franklin Steves dan Alexander Teytelboym, "Political Economy of Climate Change Policy", Smith School of Enterprise and The Environment, (2014), hal. 2,

³ United Nations, "Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention on Climate Change", (1998), hal. 11

⁴ World Wide Fund for Nature, "REDD+", diakses Februari 10, 2020, <http://forestsolutions.panda.org/solutions/redd>

dalam berbagai kebijakan baik nasional maupun internasional.⁵ Pada level nasional, Norwegia memiliki beberapa kebijakan perubahan iklim seperti; *CO2 tax, the Pollution Control Act, the Petroleum Act, dan the Greenhouse Gas Emissions Trading Act (GGETA)*. Pada level internasional, Norwegia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 30% (2020) dan 40% (2030) serta menjadi *carbon – neutral country* (2050).⁶ Serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi di negara – negara berkembang melalui kerja sama REDD+.⁷

Atas komitmennya, Norwegia menekankan hubungan antara perubahan iklim dengan pembangunan.⁸ Norwegia merupakan negara pendonor terbesar pada *UN REDD Programme Fund* yaitu sebesar US\$ 270.759.686.⁹ Dan, negara pionir dalam skema REDD+.¹⁰ Skema ini merupakan sarana bagi Norwegia dalam memenuhi komitmen pengurangan emisi global mereka. REDD+ merupakan skema pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dimana negara Annex I memberikan insentif dan kompensasi kepada negara non-Annex I dengan mekanisme pembayaran (insentif dan kompensasi) menggunakan *results-based* dan sebagai tolak ukur keberhasilan skema ini.¹¹



⁵ United Nations, “Norway | UNFCCC”, (2020), diakses Februari 10, 2020, <https://unfccc.int/node/61132>.

⁶ Environmental Defense Fund, “Norway: an Emissions Trading Case Study”, International Emission Trading Association, (2015), hal. 6 – 7

⁷ Norwegian Ministry of Climate and Environment, “Norway’s Sixth National Communication: Under the Framework Convention on Climate Change”, (2014), hal. 7 – 9

⁸ Norwegian Ministry of Climate and Environment, “Norway’s Sixth National Communication”, hal. 160

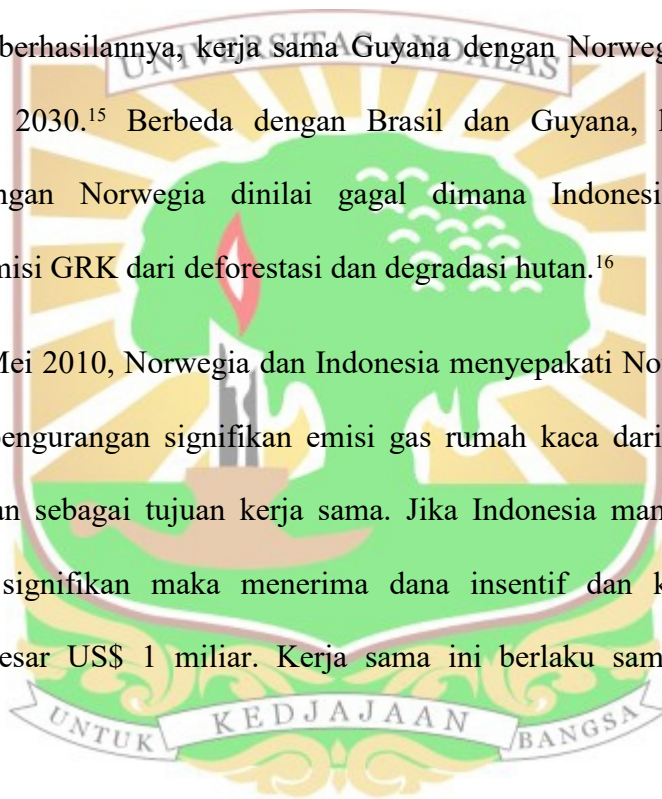
⁹ United Nations Development Programme, “Trust Fund Factsheet - UN REDD Programme Fund”, (2020), diakses Februari 12, 2020, <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00#>

¹⁰ The Nordic Centre of Excellence for Strategic Adaptation Research (NORD-STAR), “Mainstreaming climate change in Norwegian development aid: Reconciling climate priorities with aid delivery procedures”, (2015), hal. 1

¹¹ Arild Angelsen, “REDD+ as Result – based aid: General Lessons and Bilateral Agreements of Norway”, *Review of Development Economics*, Vol. 21 No. 2, (2017), hal. 239

Ada 3 (tiga) negara mitra utama penerima bantuan pendanaan kerja sama REDD+ Norwegia yaitu Brasil (19,7%), Indonesia (9,1%), dan Guyana (2,9%).¹² Dari ketiga negara mitra REDD+ Norwegia, 2 (dua) diantaranya berhasil yaitu Brasil dan Guyana. Brasil menerima dana insentif dan kompensasi REDD+ sebesar US\$ 1 miliar pada 2015.¹³ Atas keberhasilannya, kerja sama ini diperpanjang hingga tahun 2017.¹⁴ Negara kedua yang berhasil adalah Guyana. Guyana masuk ke dalam *High Forest Low Deforestation (HFLD) Country* pada 2014. Atas keberhasilannya, kerja sama Guyana dengan Norwegia diperpanjang sampai tahun 2030.¹⁵ Berbeda dengan Brasil dan Guyana, kinerja REDD+ Indonesia dengan Norwegia dinilai gagal dimana Indonesia gagal dalam mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan.¹⁶

Pada 26 Mei 2010, Norwegia dan Indonesia menyepakati Nota Kesepahaman (LoI) dalam pengurangan signifikan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan sebagai tujuan kerja sama. Jika Indonesia mampu mengurangi emisi secara signifikan maka menerima dana insentif dan kompensasi dari Norwegia sebesar US\$ 1 miliar. Kerja sama ini berlaku sampai akhir tahun



¹² Hans Peter Dejjgaard dan Jonas Appelt, “Counting What Count: Analysis of Norwegian Climate Finance and International Climate Finance Reporting”, (2017), diakses Februari 12, 2020, <https://www.forumfor.no/assets/docs/Analysis-of-Norwegian-Climate-Finance.pdf>.

¹³ Nancy Birdsall, William Savedoff, dan Frances Seymour, “The Brazil-Norway Agreement with Performance-Based Payments for Forest Conservation: Successes, Challenges, and Lessons”, (2014), diakses Februari 12, 2020, <http://feed.cgdev.org/~r/cgdev/publications/~3/KcRuiWtzS6g/brazil-norway-agreement-performance-based-payments-forest-conservation-successes>.

¹⁴ Norwegian Ministry of Climate and Environment, “Brazil”, (2018), diakses Februari 12, 2020, <https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-environment/climate/climate-and-forest-initiative/kos-innsikt/brazil-and-the-amazon-fund/id734166/>

¹⁵ Norwegian Ministry of Climate and Environment, “Guyana”, (2016), diakses Februari 12, 2020, <https://www.regjeringen.no/en/topics/climate-and-environment/climate/climate-and-forest-initiative/kos-innsikt/guyana/id734164/>

¹⁶ Arild Angelsen, “REDD+ as Result – based Aid”, hal 255

2016.¹⁷ Ada 3 (tiga) fase dalam mengimplementasikan LoI tersebut antara lain; Fase 1 (satu), Tahap Persiapan, yaitu menyusun rencana aksi, membentuk lembaga dan kapasitas yang diperlukan, dan membentuk kebijakan pendukung. Fase ini harus diselesaikan pada Januari 2011. Pada Fase 2 (dua), Tahap Implementasi, Indonesia mengimplementasikan kebijakan dan langkah-langkah nasional dan melakukan evaluasi pada sistem manajerial. Fase ini dimulai pada tahun 2011 dan berlangsung selama 3-4 tahun. Pada fase terakhir, Fase 3 (tiga), Indonesia pada tahun 2014 sudah harus menunjukkan hasil kontribusi yang terverifikasi dalam pengurangan emisi GRK.¹⁸

Tabel 1.1 Data Deforestasi dan Degradasi Hutan Selama Implementasi REDD+ di Indonesia

No.	Periode	Deforestasi (juta hektar)	Emisi GRK (juta ton CO ₂)
1.	2010	1.28	134
2.	2011	1.54	161
3.	2012	2.26	230
4.	2013	1.14	119
5.	2014	1.89	187
6.	2015	1.75	174
7.	2016	2.42	228

Sumber: Third Independent Review of The Indonesia-Norway Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions From REDD+

Dari data laporan kinerja REDD+ Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan deforestasi dan degradasi hutan masih berlangsung dan meningkat serta masih

¹⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Kingdom of Norway on Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation", (2010), diakses Februari 12, 2020, <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=NOR-2010-0012.pdf>.

¹⁸ World Resources Institute (WRI) Indonesia, "Bagaimana Kerja sama Hutan Indonesia – Norwegia Kedepannya?", (2010), diakses Februari 12, 2020, <https://wri-indonesia.org/id/blog/what's-next-indonesia-norway-cooperation-forests>.

berkontribusi pada emisi gas rumah kaca global.¹⁹ Sehingga, REDD+ Indonesia-Norwegia dinilai gagal karena tujuan kerja sama tidak tercapai dan *over-duration*.²⁰ Melalui Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Vidar Helgesen, menilai bahwa kinerja REDD+ Indonesia tidak menunjukkan dampak signifikan setelah 6 tahun berjalan.²¹ Namun, hal ini tidak merubah sikap maupun komitmen Norwegia dalam melanjutkan kerja sama ini hingga sekarang.²² Keberlanjutan kerja sama ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia tetap berjalan.

1.2. Rumusan Masalah

Perubahan lingkungan (iklim) telah menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Hal ini mendorong UNFCCC merumuskan REDD+ sebagai solusi dalam menjawab tantangan ini. Norwegia merupakan negara yang memiliki komitmen kuat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan dimana Norwegia merupakan pendonor terbesar dan pionir dalam skema REDD+ ini. Indonesia merupakan negara mitra kerja sama REDD+ Norwegia sejak tahun 2010. Kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia dinilai gagal dimana tujuan kerja sama tidak tercapai dan *over-duration*. Namun, kegagalan REDD+ Indonesia – Norwegia tidak menjadikan kerja sama ini berakhir. Norwegia yang dianggap sebagai negara dengan komitmen kuat untuk mengurangi emisi GRK tidak terlihat sikapnya

¹⁹ Julian Caldecott, Avi Mahaningtyas, Brendan Howard, David Williams dan Philippa Lincoln, “Third Independent Review of The Indonesia – Norway Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from REDD+”, Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), (2018), diakses Februari 13, 2020, www.ltsi.co.uk. hal. 13 – 14

²⁰ Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Kingdom of Norway”, hal. 5

²¹ Nicholas Jong dan Ina Parlina, “Norway slams slow REDD+ project Progress”, The Jakarta Post, (2016), diakses Februari 13, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/04/norway-slams-slow-redd-project-progress.html>

²² Dhika Kusuma Winata, “Kerja Sama Iklim Indonesia – Norwegia akan Diperpanjang”, (2019), diakses Februari 13, 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/244556-kerja-sama-iklim-indonesia-norwegia-akan-diperpanjang>.

terhadap kinerja REDD+ Indonesia. Hal ini menarik untuk dikaji dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab dari penelitian ini adalah: **“Apa faktor yang mendorong Norwegia tetap melanjutkan kerja sama REDD+ dengan Indonesia?”**

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberlanjutan kebijakan perubahan iklim Norwegia dalam skema REDD+ dengan Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi literasi kepada pihak terkait dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi Norwegia untuk tetap melanjutkan kerja sama REDD+ dengan Indonesia.

1.6. Studi Pustaka

Dalam menganalisis topik penelitian, penulis menggunakan lima kajian pustaka yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu akan menjadi referensi dan landasan bagi penulis dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Penelitian pertama yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh Jo-Kristian S. Røttereng pada tahun 2018 dengan judul *“When climate policy meets foreign policy: Pioneering and national interest in Norway’s*

mitigation strategy”.²³ Artikel ini menjelaskan dan membandingkan upaya mitigasi perubahan iklim yang dipromosikan oleh Norwegia yaitu *Carbon Capture and Storage (CCS)* dan *Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+)*. Hal ini untuk menjelaskan apa yang mendorong Norwegia memiliki komitmen yang kuat dan berusaha mempertahankan kedua upaya tersebut. Serta, menjelaskan kebijakan mitigasi domestik yang dipromosikan oleh Norwegia yang berimplikasi terhadap kepentingan nasional melalui kebijakan luar negeri.

Penelitian kedua yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh Florian Kern, James Gaede, James Meadowcroft, dan Jim Watson pada tahun 2015 dengan judul “*The political economy of carbon capture and storage: An analysis of two demonstration projects*”.²⁴ Artikel ini menjelaskan tantangan dalam pengembangan dan mengimplementasikan teknologi *Carbon Capture and Storage (CCS)* sebagai kunci dalam mitigasi perubahan iklim. Dimana teknologi ini menguntungkan karena memungkinkan pemanfaatan berkelanjutan bahan bakar fosil sambil menurun emisi gas rumah kaca. Artikel ini membandingkan pengembangan proyek CCS di dua negara yaitu Inggris dan Kanada. Inggris dinilai memiliki komitmen yang kuat atas mitigasi perubahan iklim, sedangkan Kanada tidak dimana secara konsisten gagal memenuhi kewajibannya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, pengembangan proyek CCS Kanada berjalan sedangkan Inggris tidak berjalan. Hal ini terjadi karena faktor-faktor

²³ Jo Kristian S. Røttereng, “When climate policy meets foreign policy: Pioneering and national interest in Norway’s mitigation strategy”, *Energy Research and Social Science*, Vol. 39, (2018)

²⁴ Florian Kern, James Gaede, James Meadowcroft, dan Jim Watson, “The political economy of carbon capture and storage: An analysis of two demonstration projects”, *Technological Forecasting and Social Change*, Vol. 102, (2016)

ekonomi politik memiliki pengaruh dalam proses pengembangan dan perealisasi proyek CCS.

Penelitian ketiga yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh Florian Weiler, Carola Klöck, dan Matthew Dornan pada tahun 2018 dengan judul "*Vulnerability, good governance, or donor interests? The allocation of aid for climate change adaptation*".²⁵ Artikel ini menjelaskan pola distribusi bantuan keuangan yang dilakukan negara donor dalam upaya adaptasi bagi negara berkembang. Pemberian bantuan tidak hanya didasari oleh faktor kerentanan suatu negara terhadap dampak perubahan iklim tetapi negara donor juga mempertimbangkan hubungan politik yang baik diantara negara pemberi dan penerima bantuan keuangan adaptasi untuk mempromosikan kepentingan ekonomi negara donor itu sendiri. Faktor kerentanan fisik terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi suatu negara menerima bantuan adaptasi. Namun, faktor kerentanan tidak menjadi penentu dalam menentukan jumlah alokasi bantuan adaptasi yang diterima negara penerima donor. Sehingga, bantuan adaptasi dari negara donor dinilai sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan politik.

Penelitian selanjutnya adalah sebuah artikel dari Jo-Kristian Straete Roettereng yang berjudul "*How the global and national levels interrelate in climate policymaking: Foreign Policy Analysis and the case of Carbon Capture Storage in Norway's foreign policy*".²⁶ Artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan CCS (Carbon Capture Storage) merupakan jawaban atas 3 (tiga) tantangan bagi

²⁵ Florian Weiler, Carola Klöck, dan Matthew Dornan, "Vulnerability, good governance, or donor interests? The allocation of aid for climate change adaptation", *World Development*, Vol. 104, (2018)

²⁶ Jo Kristian Straete Roettereng, "How the global and national levels interrelate in climate policymaking: Foreign Policy Analysis and the case of Carbon Capture Storage in Norway's foreign policy", *Energy Policy*, Vol. 97, (2016)

Norwegia, dimana sebagai bentuk adaptasi reaksi tekanan normatif dari rezim iklim internasional, sebagai strategi dalam melegitimasi dan memperkuat identitas Norwegia sebagai negara terdepan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan yang terakhir sebagai strategi proaktif dalam menjaga kepentingan industri minyak bumi nasional. Kebijakan ini berorientasi eksternal yaitu sebagai instrumen politik luar negeri Norwegia dalam mengukuhkan identitas dan kesungguhan Norwegia pada masyarakat internasional dan sebagai strategi dalam menjaga ekonomi stabilitas Norwegia dari gangguan tuntutan penurunan emisi karbon. Sehingga, kebijakan CCS merupakan upaya menjembatani komitmen internasional dan melindungi industri energi nasional.

Penelitian terakhir adalah artikel dari dari Keston K. Perry pada tahun 2020 yang berjudul “*For politics, people, or the planet? The political economy of fossil fuel reform, energy dependence and climate policy in Haiti*”.²⁷ Artikel ini menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim memaksa pemerintah Haiti untuk melakukan dekarbonisasi dengan cara mengurangi subsidi terhadap bahan bakar fosil. Pengurangan subsidi dilakukan atas dasar desakan dari pihak eksternal khususnya lembaga multilateral dan negara lain guna untuk mendapatkan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Haiti. Tekanan eksternal untuk mengurangi subsidi menciptakan pasar yang kompetitif bagi perusahaan multinasional dalam memasok produk-produk energi ramah lingkungan.

²⁷ Keston K. Perry, “For politics, people, or the planet? The political economy of fossil fuel reform, energy dependence and climate policy in Haiti”, *Energy Research and Social Science*, Vol. 63, (2020)

Kelima kajian pustaka diatas membantu penulis dalam memperkuat dan mendukung hipotesa penulis terkait faktor atau motif yang mempengaruhi Norwegia untuk tetap melanjutkan kerja sama REDD+ dengan Indonesia. Bahwa skema REDD+ yang diusung Norwegia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan instrumen politik internasional guna mencapai manfaat ekonomi atas apa yang diusung. Perbedaan penelitian ini dengan kelima kajian pustaka diatas adalah penelitian ini mengkaji dan menelaah faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia. Dengan Norwegia menjadi unit analisis dan menggunakan pendekatan ekonomi politik sebagai alat analisis.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Ekonomi Politik Kebijakan Perubahan Iklim

Dalam mengkaji dan menelaah faktor yang mempengaruhi Norwegia untuk tetap melanjutkan kerja sama REDD+ dengan Indonesia, penulis menggunakan pendekatan ekonomi politik. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada tulisan Thomas Tanner dan Jeremy Allouche yang berjudul "*Towards a New Political Economy of Climate Change and Development*" dimana ada beberapa hal yang menjadikan perspektif ekonomi politik krusial atau perlu dalam menganalisis kebijakan perubahan iklim. Pertama, Perubahan iklim sebagai masalah global yang bersifat lintas sektoral dimana mendorong terjadi peningkatan kompleksitas ekonomi politik yang berimplikasi pada sektor yang peka terhadap iklim dan emisi hingga sektor keuangan dan pemerintahan. Kedua, meningkatnya bantuan pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah mengubah struktur insentif dan perilaku negara dalam *rent-seeking*. Ketiga, pendekatan ekonomi politik

mampu dalam membongkar asumsi bahwa kebijakan perubahan iklim sebagai proses yang bersifat apolitis (tidak bersifat politis).²⁸

Beberapa negara mengadopsi kebijakan perubahan iklim yang ambisius sementara yang lain tidak. Dalam perspektif ekonomi politik, ada beberapa faktor yang mendorong negara untuk membentuk, mengadopsi, dan mereformasi kebijakan terkait perubahan iklim. Faktor-faktor tersebut terdapat dalam empat dimensi antara lain; karakteristik kelompok kepentingan, tingkat akuntabilitas politik, struktur pemerintahan, dan konteks internasional.²⁹ Menurut Franklin Steves dan Alexander Teytelboym, ada 6 (enam) faktor utama dalam kajian ekonomi politik sebagai faktor yang mempengaruhi dalam mendorong dan membentuk kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim:

1. Pengetahuan Publik Tentang Ancaman Perubahan Iklim

Mengingat pemerintah menanggapi tekanan publik maka tingkat pengetahuan publik tentang ancaman perubahan iklim memiliki pengaruh kuat dalam perumusan dan implementasi kebijakan ini. Pengetahuan publik dapat mengenai apakah publik melihat perubahan iklim sebagai ancaman, seberapa banyak yang mereka ketahui tentang perubahan iklim, dan apakah perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia atau sebuah fenomena alam. Ada 3 (tiga) faktor penentu yang mempengaruhi pengetahuan publik tentang perubahan iklim, antara lain;³⁰

- a) Tingkat pendidikan tersier.

²⁸ Thomas Tanner dan Jeremy Allouche, "Towards a New Political Economy of Climate Change and Development", *IDS Bulletin*, Vol. 42 No. 3, (2011), hal. 2

²⁹ Franklin Steves dan Alexander Teytelboym, "Political Economy of Climate Change Policy", *Smith School of Enterprise and The Environment*, (2014), hal. 9

³⁰ Franklin Steves dan Alexander Teytelboym, hal. 16 – 18

Tingkat pendidikan tersier yang lebih tinggi menghasilkan populasi dengan pengetahuan yang baik dan luas, yang kemungkinan akan mendapat informasi lebih baik tentang bukti ilmiah tentang perubahan iklim.

b) Kebebasan media.

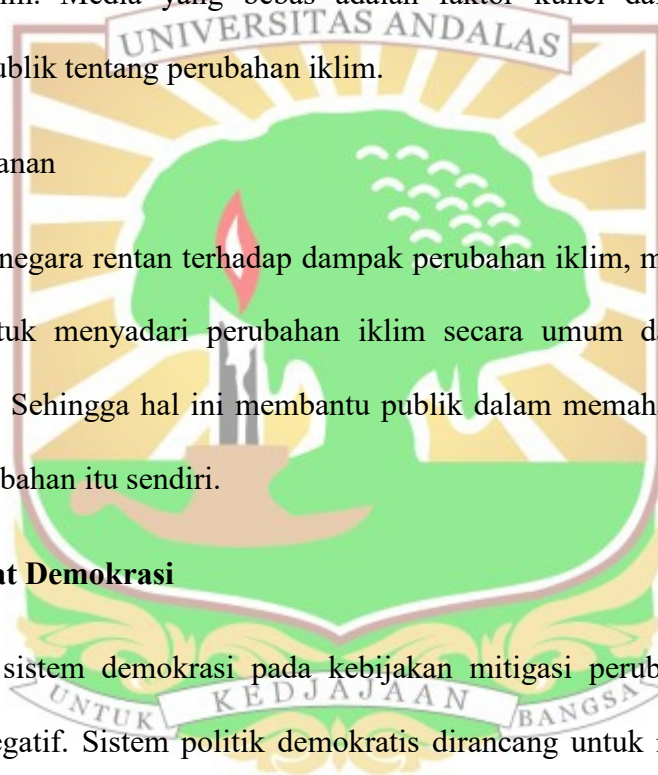
Media independen dan kritis memainkan peran penting dalam menilai dan menyebarkan temuan-temuan ilmiah, khususnya di bidang-bidang vital seperti perubahan iklim. Media yang bebas adalah faktor kunci dalam membentuk pemahaman publik tentang perubahan iklim.

c) Kerentanan

Jika suatu negara rentan terhadap dampak perubahan iklim, maka publik lebih cenderung untuk menyadari perubahan iklim secara umum dan penyebabnya secara khusus. Sehingga hal ini membantu publik dalam memahami dampak dan penyebab perubahan itu sendiri.

2. Tingkat Demokrasi

Efek dari sistem demokrasi pada kebijakan mitigasi perubahan iklim bisa positif atau negatif. Sistem politik demokratis dirancang untuk mentransmisikan keprihatinan dan prioritas rakyat ke dalam proses pembuatan kebijakan. Di negara demokratis, pengetahuan publik tentang ancaman dan sumber penyebab perubahan iklim tergolong baik, maka isu perubahan iklim akan menjadi isu yang ambisius. Namun, jika publik menganggap kebijakan perubahan iklim dapat



membahayakan prospek ekonomi jangka pendek maka kebijakan ini cenderung tidak menjadi isu ambisius.³¹

3. Kekuatan Lobi Industri Intensif Karbon

Kelompok industri intensif karbon merupakan salah bentuk kelompok kepentingan ekonomi. Sebagai kelompok yang mampu memberikan manfaat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pajak sehingga menjadikan kelompok ini salah satu sumber pertimbangan dan penentu terpenting dalam pembuatan kebijakan dan tindakan perubahan iklim. Kelompok industri intensif karbon memiliki kepentingan seperti perlindungan dan promosi terhadap kegiatan yang dilakukan. Ini menjadikan industri intensif karbon dapat menghambat kebijakan perubahan iklim. Kekuatan lobi industri intensif karbon dipengaruhi oleh besaran ukuran organisasi, jumlah pekerja, dan besaran kontribusi terhadap pendapatan pajak, serta hubungan dengan pemerintah.³² Kelompok industri intensif karbon merupakan industri penghasil karbon tinggi seperti; energi, tambang, manufaktur, dan konstruksi.³³

4. Kapasitas Administrasi Negara

Administrasi negara atau birokrasi memiliki peranan dalam mengumpulkan informasi, memberikan pendapat, merancang, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim. Sehingga, kapasitas administrasi negara (birokrasi) juga diperhitungkan terutama yang berkaitan

³¹ Sam Fankhauser, Caterina Gennaioli, dan Murray Collins, "Domestic Dynamics and International Influence: What Explains the Passage of Climate Change Legislation?", The Centre for Climate Change Economics and Policy, No. 175, (2014), hal. 7

³² Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, dan Ryan K. Beasley, "The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective", SAGE Publications, (2017), hal. 15 - 16

³³ Manfred Fischedick dan Joyashree Roy, "Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change", IPCC, (2014), hal. 749

dengan tantangan regulasi, hukum dan ekonomi yang terkait dengan kebijakan iklim. Sistem birokrasi yang terdiri atas badan/unit pemerintah dimana masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri. Suatu kebijakan dapat terhambat jika sistem birokrasi buruk dimana tidak adanya koordinasi antara badan-badan pemerintah sehingga menciptakan konflik sudut pandang (tujuan badan atau unit). Sedangkan pada sistem birokrasi yang baik dimana adanya koordinasi maka konflik dapat diatasi dengan berkompromi dalam tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut.³⁴

5. Per Kapita dan Total Emisi CO₂

Ada dua cara yang mungkin mempengaruhi adopsi kebijakan perubahan iklim yaitu pendapatan per kapita atau total emisi CO₂ yang dihasilkan. Di satu sisi, negara dengan emisi CO₂ tinggi cenderung menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi (secara historis). Negara yang memiliki total emisi yang rendah mungkin lebih enggan untuk memotong emisi karena kontribusinya terhadap perubahan iklim kecil dan karenanya setiap penurunan emisi hanya akan memiliki dampak yang dapat diabaikan pada emisi global. Oleh karena itu, dampak pendapatan per kapita dan total emisi CO₂ terhadap penerapan kebijakan perubahan iklim juga diteliti.

6. Komitmen Internasional

Dinamika isu perubahan iklim yang berlangsung pada level internasional memiliki implikasi terhadap proses adopsi dan implementasi kebijakan perubahan iklim pada level domestik. Adanya peningkatan jumlah kebijakan perubahan iklim

³⁴ Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, dan Ryan K. Beasley, hal. 16 – 18

di level domestik dipengaruhi oleh adanya pengesahan undang-undang serupa di tempat lain baik pada negara lain atau sistem internasional. Efek ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Difusi kebijakan internasional

Difusi kebijakan adalah adanya perubahan perilaku negara dalam mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim dimana secara sistematis dikondisikan dengan kebijakan yang terdapat negara lain dan/atau sistem internasional. Adanya difusi kebijakan internasional disebabkan karena adanya *knowledge spill-overs*, *learning effects*, dan *peer pressure*.³⁵

b) Efek komitmen

Menyatakan komitmen terhadap suatu perjanjian internasional tentu memberikan beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh negara tersebut. Meskipun sanksi atas ketidakpatuhan cenderung bersifat lunak, namun negara mempertaruhkan reputasi jika mengingkari janji internasional. Tujuan dari komitmen internasional tersebut adalah mendorong upaya reformasi dan implementasi kebijakan perubahan iklim di level domestik. Sehingga, diharapkan pihak legislatif dan eksekutif untuk menjalankan kewajiban atas perjanjian internasional.³⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebijakan Norwegia untuk tetap melanjutkan kerja sama REDD+ di Indonesia dengan mengkonseptualisasikan ke-6 (enam) faktor diatas melalui

³⁵ Samuel Fankhauser, Caterina Gennaioli, dan Murray Collins, "Do international factors influence the passage of climate change legislation?", *Climate Policy*, Vol. 16 No. 3, (2016), hal 9

³⁶ Samuel Fankhauser, Caterina Gennaioli, dan Murray Collins, hal. 9 – 10

penjelasan faktor-faktor mana yang memiliki implikasi dominan atau peran dari masing-masing faktor tersebut dalam mempengaruhi keberlanjutan kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Menurut Moleong dan Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena guna untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan subjek penelitian baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.³⁷ Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif guna untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel mempengaruhi perubahan pada variabel lain yang didasarkan pada teori atau kerangka konseptual dalam menjelaskan subjek penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai motif atau faktor yang mendorong Norwegia dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim melalui skema REDD+.

1.8.2. Batasan Penelitian

Agar sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, penulis memberikan batasan penelitian terkait motif yang melatar belakangi Norwegia mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim melalui skema REDD+. Dengan rentang tahun sejak dimulainya kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia yaitu tahun 2010 hingga 2016. Tahun 2010 merupakan awal mula terjalannya kerja sama REDD+

³⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial", Surabaya: Media Sahabat Cendekia, (2019), hal. 75

³⁸ Cong Li dan Don Stacks, "Research Methodology", Measuring the Impact of Social Media on Business Profit & Success, (2016), hal. 50 - 51

Norwegia-Indonesia. Sementara tahun 2016 merupakan tahun akhir kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia menurut isi Nota Kesepahaman kerja sama.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan variabel yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan dianalisis. Sedangkan, unit eksplanasi merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku variabel analisis.³⁹ Dalam penelitian ini, unit analisis adalah negara Norwegia. Sedangkan, unit eksplanasi adalah kerja sama REDD+ Norwegia-Indonesia. Kemudian, tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Penulis mempelajari penelitian atau informasi yang terkait pada isu yang dalam penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian, surat kabar, dan bacaan lain yang berhubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, mengolah, dan merangkai data menjadi sebuah informasi baru guna memberi penjelasan atau pendeskripsian hipotesis agar mudah dimengerti.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan,

³⁹ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia (1994), hal. 39

⁴⁰ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, "Metodologi Penelitian Sosial", hal. 203

dikelompokkan, dan diinterpretasikan sehingga dapat menjelaskan isu yang dibahas. Teknik analisis data dalam penelitian ini berangkat dari komitmen Norwegia sebagai negara terdepan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia. Penelitian menggunakan pendekatan ekonomi politik yang diusung Franklin Steves dan Alexander Teytelboym dimana pendekatan ini menjelaskan faktor yang mendorong Norwegia mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim melalui skema REDD+.

Tabel 1.2 Teknik Analisis Data

No.	Indikator	Keterangan	Data Pendukung
1.	Pengetahuan Iklim Tentang Ancaman Perubahan Iklim	Jika publik menganggap perubahan iklim sebagai ancaman maka publik akan memberikan tekanan bagi pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait. Namun, gagalnya proses perumusan dan pengimplementasian suatu kebijakan bisa disebabkan oleh tidaknya kebutuhan dari publik yang mendesak.	<i>The World Bank's World Development Indicators; Freedom House's Freedom of the Media index; the Climate Change Vulnerability Index.</i>
2.	Tingkat Demokrasi	Memiliki peran sebagai saluran dalam menyampaikan keprihatinan dan prioritas publik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat berefek positif atau negatif terhadap pengimplementasian suatu kebijakan tergantung pada aspirasi rakyat.	<i>Polity IV Regime Characteristics.</i>
3.	Kekuatan Lobi Industri Intensif Karbon	Mampu mempengaruhi proses perumusan dan pengimplementasian suatu kebijakan. Jika suatu kebijakan memberikan manfaat bagi kelompok industri intensif karbon maka kebijakan tersebut dapat berjalan. Dan sebaliknya.	<i>The share of carbon-intensive industries in each country's Gross Domestic Product.</i>
4.	Kapasitas Administrasi Negara	Memiliki peran dalam mengumpulkan informasi, merancang, merumuskan, dan	<i>The World Bank's "Government Effectiveness" and</i>

		mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika administrasi negara mampu dalam menjalankan perannya maka suatu kebijakan dalam berjalan. Dan begitu juga sebaliknya.	<i>“Regulatory Quality” Governance Indicators.</i>
5.	Per Kapita dan Total Emisi CO2	Jika suatu negara memiliki tingkat pendapatan atau total emisi CO2 yang dihasilkan tinggi, diharapkan negara tersebut mendukung kebijakan perubahan iklim. Bagi negara yang tidak memiliki pendapatan atau total emisi yang rendah, biasa menolak untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi global.	<i>CO₂ and Greenhouse Gas Emissions (impacts per capita and total CO₂ emissions have on the adoption of climate change policy).</i>
6.	Komitmen Internasional	Suatu negara yang memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dipengaruhi oleh adanya difusi kebijakan internasional dan efek komitmen.	<i>The European Environment Agency (Tracking progress towards Kyoto Protocol).</i>

Sumber: diolah oleh penulis



1.9. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab I ini menggambarkan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Bab II : Rezim Perubahan Iklim dan Kebijakan Iklim Norwegia

Bab ini berisi tentang gambaran umum terkait Rezim Perubahan Iklim, posisi Norwegia dan Indonesia dalam rezim perubahan iklim serta dinamika hubungan kedua negara terkait kerja sama REDD+ di Indonesia.

Bab III : Implementasi REDD+ di Indonesia

Bab ini menjelaskan implementasi skema REDD+ di Indonesia

Bab IV : Faktor Keberlanjutan Kerja Sama REDD+ Norwegia-Indonesia

Bab ini berisi analisis terkait faktor – faktor yang mempengaruhi Norwegia untuk tetap melanjutkan kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia di Indonesia dengan menggunakan konsep yang sudah disampaikan diatas.

Bab V : Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

